

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1. Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian dengan tema yang sama pernah diangkat oleh peneliti terdahulu. Terdapat beberapa judul yang relevan mengenai tawuran antar pelajar.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul & Tahun	Metode Penelitian	Tujuan dan Hasil Penelitian
1.	Wiyanto, W. & Husain, A Bachtiar. “Model Implementasi Manajemen Kerja sama Untuk Mencegah dan Meminimalisir Perkelahian Antar Pelajar di Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor.” 2018	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (<i>indep interview</i>), observasi dan dokumentasi.	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses dan model faktual penerapan manajemen kerja sama antara sekolah, orangtua, dan polsek untuk mencegah dan meminimalisir perkelahian antar pelajar di Kecamatan Parung-Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang

			<p>bagaimana kerja sama antar berbagai pihak untuk mencegah dan meminimalisir perkelahian antar pelajar di kecamatan Parung. Kerjasama ini diwadahi oleh satgas pelajar yang hadir akibat dari konsekuensi bahwa tawuran merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Kerja sama ini terbukti mampu mencegah dan meminimalisir tawuran pelajar.</p>
Perbedaan:	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah membahas terkait Satuan Tugas (satgas) Pelajar. Perbedaannya adalah penelitian yang akan dilakukan meneliti pada Satuan Tugas (satgas) pelajar di Kota.Bogor wilayah Kec. Bogor Barat dan memfokuskan pembahasan terkait koordinasi dalam implementasi kebijakan SK Wali Kota. Bogor No. 420.45-803 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pelajar Kota.Bogor masa bakti 2020-2024</p>		
2	Enadarlita. & Asvio, N.	Penelitian dilakukan dengan metode	Tujuan dalam penelitian ini ialah menganalisis

	<p>“Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi Di Provinsi Jambi” 2019</p>	<p>kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, koesioner dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini ialah variabel independen koordinasi dan komunikasi, variabel dependen efektivitas organisasi.</p>	<p>besarnya pengaruh pada koordinasi terhaap peningkatan efektivitas organisasi, komunikasi terhadap peningkatan efektivitas organisasi, koordinasi dan komunikasi terhadap peningkatan efektivitas organisasi.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam efektivitas organisasi. Komunikasi tidak memiliki pengaruh signifikan dalam efektivitas organisasi. Namun, apabila koordinasi dan komunikasi dilakukan beriringan dapat meningkatkan efektivitas organisasi begitupun sebaliknya.</p>
Perbedaan:	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas adanya pengaruh antara koordinasi dan komunikasi dalam efektivitas</p>		

	<p>organisasi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan membahas bahwa adanya keterkaitan koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja pada pelajar. Karena komunikasi tidak terlepas dari proses koordinasi.</p>		
3.	<p>Putri, Vivi O. “Pelaksanaan Koordinasi Camat dengan Kepolisian Dalam Mengamankan Kenakalan Remaja Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” 2019</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan sumber data primer melalui wawancara, angket dan observasi dan data sekunder melalui arsip, litelatur serta laporan.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi camat dengan kepolisian dalam mengamankan kenakalan remaja di kecamatan tualang kabupaten siak.</p> <p>Hasil Penelitian ini menjelaskan koordinasi antar pihak kecamatan dengan kepolisian terlaksana dengan baik dan dapat mengatasi kasus kenakalan remaja di kecamatan. Tualang. Pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada remaja-remaja, memberikan motivasi hingga rapat hulanan yang dilakukan oleh kedua pihak yaitu camat</p>

			dengan kepolisian.
Perbedaan:	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah koordinasi antar berbagai lembaga dilakukan dalam Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor. Penelitian ini berlandaskan pada kebijakan terkait pencegahan penyimpangan perilaku remaja di Kota. Bogor yaitu SK Wali Kota. Bogor No. 420.45-803 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pelajar Kota. Bogor masa bakti 2020-2024		
4.	Bedasari, Hafzana dan Djaiz, M. “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kenakalan Remaja Oleh Aparat POLSEK Karimun Kabupaten Karimun.” 2018	Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh aparat Polsek Karimun Kabupaten Karimun. Polisi memiliki dua kekuasaan yaitu

		<p>kekuasaan dalam bidang hukum dan kekuasaan dalam pemerintahan. Sehingga memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai aparat penegak hukum, penjaga ketertiban umum dan sebagai pengayom masyarakat. Dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja pihak polsek karimun melakukan penyuluhan, patroli, razia, penertiban dan pendekatan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat polsek Karimun sudah “Baik”.</p>
<p>Perbedaan:</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh polisi, berbeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis membahas terkait koordinasi dalam implementasi kebijakan yang dibuat oleh wali kota terkait satuan tugas (satgas) pelajar sebagai upaya mencegah penyimpangan perilaku remaja pada pelajar.</p>	

5.	Prihatin, Elok & Dwimawanti, Ida H. “ <i>Collaborative Governance</i> dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten. Tegal” 2020	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.	<p>Tujuan penelitian adalah mengetahui dan memahami bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Kabupaten Tegal dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kolaborasi.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif dilakukan dengan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, berkomitmen terhadap proses, pemahaman bersama dengan hasil sementara kolaborasi ini adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi antar aktor kolaborasi dalam menangani masalah kenakalan remaja di Kab. Tegal. Pada pelaksanaan <i>collaborative</i></p>
----	--	--	--

			<p><i>governance</i> terdapat faktor pendorong yaitu kualitas sumber daya manusiaterpenuhi, ketersediaan infrastruktur, insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi penanganan kenakalan remaja di Kab. Tegal, adanya sejarah kerjasama yang buruk mendorong kolaborasi ini semakin baik, adanya proses transparansi. Faktor penghambat yang ditemui yaitu keterbatasan sumber daya keuangan, kurangnya trasparansi kepada publik, kurang insetif kegiatan sosialisasi dan ketidakterseadaannya LPKS.</p>
Perbedaan:	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat adalah penelitian ini membahas pelaksanaan <i>collaborative governance</i> dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Berbeda dengan penelitian yang akan diangkat yaitu penelitian ini membahas terkait</p>		

	<p>pengecegan penyimpangan perilaku remaja yang dilakukan melalui Satuan Tugas (satgas) pelajar Kota. Bogor berfokus pada pelaksanaan koordinasi implementasi kebijakan Satuan Tugas (satgas) pelajar Kota. Bogor wilayah Kec. Bogor barat.</p>
--	---

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja dilakukan, mulai dari implementasi sebuah kebijakan, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pihak berwenang (polisi) dan kerja sama dengan pemerintah guna mengatasi kenakalan remaja. Penelitian-penelitian di atas merupakan penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan yaitu terkait pencegahan kenakalan remaja. Hal yang membedakan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini berfokus pada suatu kebijakan wali kota yang dikeluarkan pada tahun 2020. SK Wali. Kota Bogor No. 402.45-803 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Pelajar Kota Bogor Masa Bakti 2020-2024. Satgas Pelajar Kota. Bogor dibentuk sebagai upaya Pencegahan penyimpangan perilaku pada pelajar di Kota.Bogor. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses koordinasi di dalam satgas pelajar kota. bogor sehingga kerja sama dapat berjalan dalam pelaksanaan pencegahan penyimpangan perilaku. Penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan penyimpangan perilaku remaja melalui Satuan Tugas (satgas) Pelajar Kota. Bogor.

2.2. Kajian Teori.

2.2.1. Implementasi Kebijakan.

2.2.1.1. Definisi Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci yang penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara untuk sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Cara tersebut diubah dengan melalui program-program kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor pembuat kebijakan. Implementasi melibatkan semua kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh cabang legislatif bersama pemerintah. Kegiatan-kegiatan dalam implementasi termasuk membentuk organisasi baru, departemen, agen, dll (Rusdiyanta., *et al.* 2022) Unsur perubahan yang berkaitan dengan implementasi menurut Situmorang, C. (2016) Pertama, kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari tujuan awalnya akan sangat memengaruhi implementasi. Kedua, jumlah perubahan para organisasi akan memengaruhi implementasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan arah tujuan serta reorganisasi pada organisasi terkait akan sangat memengaruhi proses dan berjalannya sebuah implementasi kebijakan, karena dapat memunculkan tuntutan terhadap struktur dan prosedur.

Menurut Dunn, W. N. (1999) Implementasi kebijakan ialah tahapan strategis yang dilakukan setelah adanya proses perumusan suatu kebijakan, dikarenakan pada tahap ini suatu kebijakan akan diuji, baik secara substansi maupun tingkat efektivitas penggunaannya. Menurut Suharto (2005) kebijakan sosial merupakan suatu ketetapan yang dibuat secara kolektif guna mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi

masalah (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai bentuk kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Tujuan dari hadirnya kebijakan sosial adalah;

- a) Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
- c) Meningkatkan hubungan intra sosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- d) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial- ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
- e) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial.

2.2.1.2. Tahap Implementasi Kebijakan.

Menurut Adi (2002) Implementasi merupakan sebuah proses mentransformasikan tujuan ke dalam sebuah agenda atau rencana ke dalam sebuah aksi maupun praktik yang menimbulkan dampak secara langsung ke tatanan masyarakat. Tahapan implementasi sebagai berikut :

- a) Tahap persiapan, dalam tahap persiapan terdiri dari dua hal yaitu tahap persiapan petugas dan tahap persiapan lapangan.

- b) Tahap pengkajian (*Assesment*), tahapan ini dilakukan dengan memilah kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
- c) Tahap perencanaan alternatif program (*Designing*), tahap ini petugas sebagai agen melakukan diskusi dengan masyarakat tentang pengimplementasian program.
- d) Tahap pemformulasian rencana aksi (*Formulation stage*), tahap ini petugas dan masyarakat dapat memetakan keberhasilan.

2.2.1.3. Variabel-variabel Implementasi Kebijakan.

Tahap implementasi merupakan tahap sangat penting dalam kebijakan karena formulasi kebijakan sudah sempurna tetapi mengalami kegagalan jika implementasinya kurang bagus. Implementasi kebijakan berada pada posisi antara formulasi dan evaluasi suatu kebijakan sehingga implementasi penting dan strategis. Variabel-variabel dalam implementasi menurut van meter van horn (1975) dalam (Rusdiyanta, *et al.* 2022)

- a) Tujuan dan standar kebijakan (*policy standards and objectives*). suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Menurut van meter van horn indentifikasi indikator - indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator- indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah terealisasikan. Ukuran-ukuran dasar (standar kebijakan) dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan - tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami

kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi.

b) Sumber daya kebijakan (*policy resources*) kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena sangat menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Besar kecilnya dana menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

c) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi (*interorganizational communication and enforcement activities*). kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif jika tidak dibarengi adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk menjadi penyimpangan. Hal ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (*superior*) mestinya mampu menciptakan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealis sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan. Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan.

Tepat dengan pelaksana, konsistensi dan keseragaman tujuan dan standar yang di komunikasikan dengan berbagai sumber informasi sangat perlu diperhatikan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi atau pun sumber yang sama memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau bahkan bertentangan, maka para pelaksana kebijakan akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud dari kebijakan.

Menurut van meter van horn dalam mengimplementasi kebijakan akan berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh karena posisi hierarkis mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil yang diukur dari:

- a) Rekrutmen dan seleksi,
- b) penugasan dan relokasi,
- c) kenaikan pangkat dan
- d) Akhirnya pemecatan.

Di samping itu, mereka mempunyai kontrol atas alokasi anggaran belanja pada biro-biro pemerintah dan kantor-kantor daerah yang dapat mereka tingkatkan atau kurangi. Mereka juga mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Selain itu juga, para

pejabat-pejabat ini mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.

d) karakteristik dari agen pelaksana (*Implementator the characteristics of the implementing agencies*). Karakteristik dari badan pelaksana dilihat dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri ciri struktur formal dari organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Di samping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- e) Kecenderungan (*Disposition*) dari pelaksana (*The disposition of implementors*) kesemua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat berpengaruh bentuk respons individu pelaksana menjadi penyebab dari keberhasilan dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi bila (loyalitas) pelaksana kepada organisasi rendah.
- f) Kondisi ekonomi, Sosial, dan politik (*Economic, social, and political conditions*). Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan di depan, kondisi Sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Ini merupakan implikasi dari perspektif sistemik. Menurut syahrudin (2019) dalam kondisi ekonomi sosial dan politik yang perlu menjadi perhatian dalam menilai kinerja implementasi kebijakan publik sebagaimana yang ditawarkan oleh van meter dan van horn adalah sejauh mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Karena itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

2.2.2 Koordinasi.

2.2.2.1 Definisi Koordinasi.

Menurut Handoko, H. (2014) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Handoko, H. (2014) menjelaskan manfaat dari koordinasi yaitu; Pertama, dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi. Kedua, menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting. Ketiga, menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi. Keempat, menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi. Dan kelima, menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan (Handayani, S (2002). Dalam melakukan koordinasi menurut M.P. Follet dalam (Wirjana, B.R. 2007) koordinasi yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Kontak langsung. Aktivitas orang-orang yang berbeda dapat dikoordinasikan dengan efektif melalui hubungan personal langsung.
- b) Mulai sejak awal. Koordinasi bisa dicapai lebih mudah bila dilakukan pada tahap awal penyusunan rencana dan kebijakan. Koordinasi akan sukar dicapai pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian koordinasi harus dimulai pada tahap perencanaan.

- c) Relasi timbal balik. Untuk mencapai koordinasi yang baik harus ada integrasi semua upaya dan minat pada maksud dan tujuan yang sama. Prinsip ini mengatakan bahwa semua faktor dalam suatu situasi seperti manusia, material, dan lingkungan saling berhubungan.
- d) Kontinuitas. Koordinasi merupakan proses yang *continue* mulai dari perencanaan sampai proses-proses manajerial lainnya. Karena itu, koordinasi harus dilihat sebagai proses yang terus-menerus.

2.2.2.2. Strategi Koordinasi.

Patti & Resnick (1980) dalam (Ashman, Krist. K.K & Hull, G.H. 2009) keterampilan makro untuk perubahan organisasi dan komunitas adalah keterampilan koordinasi. Dalam tingkat makro keterampilan yang harus dimiliki untuk perubahan organisasi dan komunitas salah satunya adalah kemampuan kolaborasi yang merupakan prosedur di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk melayani klien tertentu. Jika sistem target rasional dan akan mendengarkan ide-ide baru atau menantang dan bertindak dengan itikad baik, kolaborasi adalah rute yang lebih disukai. Klien dapat berupa individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Strategi tersebut mencakup semua hal berikut:

- a) Menyediakan fakta tentang masalah aktual mengasumsikan bahwa target tidak mengetahui banyak tentang keberadaan masalah tertentu.
- b) Menawarkan opsi untuk menyelesaikan masalah membantu target mempertimbangkan solusi lain yang diyakini atau akan efektif oleh sistem tindakan.
- c) Meminta izin untuk mencoba solusi berdasarkan percobaan sering membantu karena tidak mengikat target pada perjanjian terbuka dengan konsekuensi yang tidak diketahui.

- d) Meminta izin untuk membentuk komite untuk mempertimbangkan masalah dan kemungkinan alternatif meningkatkan keterlibatan target dalam masalah dan memperluas jumlah orang yang mengetahui situasi tersebut. Itu tidak terlalu mengancam, karena satu-satunya permintaan adalah komite studi.
- e) Meminta peningkatan peluang untuk sistem target dan tindakan (atau klien) untuk berkumpul dan berbagi kepentingan mungkin agak lebih mengancam target, tetapi hal itu membuat kedua pihak berbicara tentang masalah mereka masing-masing.
- f) Menarik nilai-nilai, etika, atau keberatan dari sistem target mengasumsikan bahwa nilai-nilai atau etika dari target sesuai dengan sistem tindakan.
- g) Meyakinkan sistem target melalui debat dan diskusi rasional paling efektif ketika sistem target dan tindakan berbagi nilai-nilai tertentu atau ketika data yang disajikan mengarah pada kesimpulan yang dapat diterima oleh sistem target.
- h) Mengidentifikasi hasil yang merugikan yang muncul dari kelanjutan situasi saat ini dapat menjadi efektif jika hasil negatif tersebut realistis atau memiliki kemungkinan yang realistis untuk terjadi.

Strategi koordinasi harus dicoba sebelum menggunakan pendekatan permusuhan untuk pemecahan masalah. Pendekatan permusuhan berisiko mengasingkan baik target maupun mereka yang tidak terlibat langsung dalam situasi tersebut, seperti rekan kerja. Strategi kolaboratif adalah upaya itikad baik untuk mengubah sistem target berdasarkan asumsi positif tentang target. Hanya ketika mereka gagal, pendekatan lain harus digunakan. Mungkin ada saat-saat ketika strategi kolaboratif dan permusuhan

bekerja sama atau ketika taktik yang diberikan dapat digunakan secara berbeda dari yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.2.2.3. Faktor-faktor Koordinasi.

Menurut Hasibuan, Malayu. S. P (2014) dalam koordinasi terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi koordinasi, yaitu;

- a) Kesatuan tindakan, konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, mengartikan bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- b) Komunikasi, Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat di koordinasikan berdasarkan rentang di mana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.
- c) Pembagian kerja, pengertian pembagian kerja adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi
- d) Disiplin, Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat

menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

2.2.2.4. Ciri-ciri Koordinasi.

Menurut Handyaningrat (2002) dalam melakukan koordinasi agar dapat berjalan secara efektif terdapat ciri-ciri koordinasi yang menjadi acuan dalam berkoordinasi antar anggota organisasi (*Internal*) atau antar organisasi (*Eksternal*) yaitu;

- a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- b) Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama. Hal ini disebabkan karena kerja sama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continues process*) artinya suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- c) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- d) Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian

di dalam sebagai kelompok di mana mereka bekerja sama.

- e) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

2.2.2.5. Indikator Koordinasi.

Handayaniingrat (2002) juga menjelaskan bahwa dalam melakukan koordinasi dapat diukur dengan 5 indikator yaitu;

1. Komunikasi
 - a) Ada tidaknya informasi
 - b) Ada tidaknya alur informasi
 - c) Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a) Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b) Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a) Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b) Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a) Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b) Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c) Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - d) Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a) Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan.
 - b) Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan.

2.2.3. Komunikasi Dalam Organisasi.

2.2.3.1. Definisi Komunikasi Dalam Organisasi.

Menurut Mas, Sitti R. & Haris, P. I. (2020) Komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator (sumber) melalui saluran-saluran tertentu baik secara langsung tidak langsung dengan maksud memberikan dampak effect kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Yang memenuhi 5 unsur *who, says what, in which channel, to whom with, what effect*. Komunikasi berasal dari bahasa Latin *Communicare* yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris *Communication* yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhana dapat di kemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-lsimbol yang mengandung arti dari seorang sumber atau komunikator kepada seorang penerima atau komunikan dengan tujuan tertentu (Suranto, A. W. 2010)

Komunikasi organisasi merupakan komunikasi di antara anggota-anggota organisasi, analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Sistem tersebut menyangkut pertunjukan dan penafsiran pesan di antara banyaknya individu pada saat yang sama yang memiliki jenis hubungan berlainan yang saling berhubungan (Mas, Sitti R. & Haris, P. I. 2020). komunikasi organisasi dapat dimaknai juga sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu unit atau bagian tertentu dalam suatu organisasi atau lembaga. Seven S Mckinsey (1980) dalam (Mas, Sitti R. & Haris, P. I. 2020) Menjelaskan terdapat tujuh unsur utama dalam komunikasi organisasi yaitu; *Structure, strategy, system, style, skill, staff & shared value*.

Komunikasi organisasi memiliki dua sifat yaitu, formal dan informal dan melibatkan komunikasi diadik, antarpribadi, dan terkadang publik. Arti dari komunikasi organisasi yang formal adalah komunikasi yang terstruktur seperti dari atasan ke bawahan, bawahan ke atasan atau horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak ada hubungannya dengan tatanan struktur organisasi meskipun anggota dalam satu organisasi, seperti komunikasi antar sejawat ataupun gosip. Lingkup jaringan komunikasi organisasi lebih besar daripada komunikasi kelompok (Mulyana, 2001)

2.2.3.2. Fungsi Komunikasi Dalam Organisasi.

Menurut Robbin (2003) dalam (Yusuf, F. A & Maliki, B. I. 2021) komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi; pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi dan informasi.

- a) Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan komunikasi informal juga mengendalikan perilaku
- b) Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan ke para karyawan apa yang harus dilakukannya seberapa baik mereka bekerja dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar
- c) Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Oleh karena itu, komunikasi memfasilitasi pelepasan ungkapan emosi perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial.
- d) Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui

penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif.

2.2.3.3. Metode Komunikasi Dalam Organisasi.

Menurut Liliwari, A. (2014) komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Metode komunikasi organisasi menggunakan;

a) Komunikasi tertulis.

Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan pesan (informasi) secara tertulis dari satu sumber dan dikirimkan atau diberikan kepada pihak penerima. Lazimnya, komunikasi tertulis dilakukan melalui:

1. Surat merupakan cara berkomunikasi tertulis yang bertujuan untuk mengalihkan sebuah informasi dari satu sumber kepada penerima baik perorangan, kelompok atau unit kerja di dalam maupun di luar lingkungan organisasi
2. Memo atau bisa disebut dengan office memorandum, digunakan oleh seorang pejabat kepada seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungan organisasi. Isi dari sebuah memo biasanya tentang satu topik bersifat impersonal (dinas dan resmi). memo kurang formal dibandingkan dengan surat.
3. Laporan (*report*) merupakan komunikasi yang berisi perkembangan atau kemajuan suatu kegiatan atau proyek yang sering digunakan sebagai informasi dasar bagi pengambilan keputusan.
4. Manual adalah komunikasi tertulis yang bervariasi dalam sebuah organisasi. Manual biasanya berisi perintah

bagaimana seorang karyawan harus mengerjakan suatu tugas secara bertahap. Terkadang manual berisi informasi tentang aturan organisasi aturan mengoperasikan komputer atau internet.

5. Formulir (*form*) merupakan cara komunikasi tertulis yang sudah berpola (*patent*) artinya organisasi telah menetapkan standarisasinya.

b) Komunikasi lisan.

Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa dilakukan dalam organisasi misalnya melalui komunikasi antar pribadi atau kelompok baik dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi (*task*) maupun dalam pertemuan formal (rapat), penyampaian laporan organisasi hingga ke pertemuan informal. Komunikasi lisan dikenal pula sebagai komunikasi antar pribadi. Komunikasi lisan mempunyai pengaruh yang sangat besar di antara dua pihak yang berkomunikasi di mana para partisipasinya dapat menyampaikan dan merespons informasi secara verbal maupun nonverbal sehingga memudahkan pemahaman bersama.

c) Komunikasi nonverbal.

Komunikasi nonverbal adalah cara berkomunikasi dengan mengirimkan informasi dalam bentuk simbol-simbol nonverbal. Berkomunikasi dengan simbol nonverbal ternyata mempunyai kekuatan tertentu. Menurut Albert Mehrabian (1972) dalam (Liliweri, Alo. 2014) Manusia cenderung berkomunikasi secara nonverbal terutama menggunakan wajah dan tanda-tanda dari bagian tubuh pada wajah seperti mata, hidung, bibir dan dahi.

d) Media elektronik.

Komunikasi dalam organisasi dapat melalui media elektronik untuk memindahkan informasi baik informasi secara verbal maupun nonverbal. Pertukaran informasi dengan bantuan media bertujuan untuk mengalihkan pesan tertulis secara tepat, hemat dan murah melalui jaringan komputer dalam *local area network* (LAN).

2.2.3.4 Macam-macam Komunikasi Dalam Organisasi.

Menurut Handyaningrat, S (2002) Komunikasi dalam organisasi menghasilkan informasi-informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kegiatan operasional nya, macam-macam komunikasi dalam organisasi terbagi dua yaitu;

a) Komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya

Komunikasi (hubungan) antara pimpinan dengan bawahan yaitu masalah komunikasi mengenai segala keputusan-keputusan yang menyangkut karyawan nya, di mana pihak pimpinan perusahaan pada satu pihak menentukan kewenangan atau kebijaksanaan yang menyangkut karyawan-karyawan nya, sedangkan pada pihak lain yaitu para karyawan mempunyai kepentingan sendiri yang lain daripada kepentingan pihak yang pertama tadi.

b) Komunikasi secara langsung antara individu-individu dalam organisasi.

Setiap kegiatan dari organisasi dilakukan melalui hubungan timbal balik antara orang-orang yang melakukan komunikasi satu sama lain. Di dalam organisasi hal itu dibedakan antara dua bentuk komunikasi yaitu; pertama, komunikasi yang bersifat lisan (*oral communication*). kedua, komunikasi yang bersifat tertulis (*written communication*). dalam mempelajari komunikasi dalam hubungan ini kita akan

melihat adanya suatu arah dari atas ke bawah (*downward*) dan dari bawah ke atas (*upward*) atau komunikasi dua arah (*two way traffic*) di samping itu terdapat komunikasi dari samping kiri ke samping kanan dan sebaliknya (*lateral communication*). sedangkan komunikasi yang bersifat informal yang berada di antara karyawan itu tidak mengikuti pola-pola tersebut di atas.

2.2.3.5. Arah Aliran Komunikasi Dalam Organisasi.

Dalam organisasi dapat terjadi berbagai arah komunikasi yang menghasilkan kerangka untuk terjadinya komunikasi organisasi, arus komunikasi dalam organisasi menurut Ivancevich (2007) dalam (Silviani, I. 2020) yaitu:

- a) Komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada kedudukan lebih tinggi dalam hierarki organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan lebih rendah. Bentuk paling umum dari komunikasi ke bawah adalah instruksi kerja, memo resmi, pernyataan kebijakan perusahaan, prosedur, manual kerja, atau publikasi perusahaan.
- b) Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir pada individu dari hierarki kedudukan yang lebih rendah dalam struktur organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Dalam situasi-situasi semacam ini, komunikator berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi dari pada penerima pesan. Beberapa bentuk komunikasi ke atas yang paling umum melibatkan pemberian saran, pertemuan kelompok dan protes terhadap prosedur kerja.
- c) Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi lintas fungsi yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Contoh

bentuk komunikasi ini adalah komunikasi antara departemen produksi data penjualan dalam sebuah organisasi bisnis dan komunikasi antara berbagai jurusan dalam sebuah fakultas di sebuah universitas komunikasi ini diperlukan demi terjadinya koordinasi dan integrasi dari berbagai fungsi organisasi yang beragam.

- d) Komunikasi diagonal yaitu komunikasi yang terjadi lintas fungsi dan lintas tingkatan dalam sebuah organisasi. Walaupun mungkin jenis komunikasi ini adalah jenis yang paling jarang digunakan dalam organisasi, komunikasi diagonal penting dalam situasi-situasi di mana para anggotanya tidak dapat berkomunikasi dengan efektif melalui jalur-jalur komunikasi yang konvensional. Contohnya, pengawasan dalam organisasi dalam organisasi besar dapat saja ingin melakukan analisis biaya distribusi. Salah satu dari bagian tugas tersebut dapat saja mengharuskannya meminta laporan khusus dari tenaga penjualan yang dikirimkan langsung kepada pengawas tersebut, alih-alih melalui jalur komunikasi yang biasanya menjadi departemen pemasaran. Karena itu aliran komunikasi menjadi diagonal dan bukan vertikal atau horizontal. Dalam hal ini jalur komunikasi diagonal dapat menjadi pilihan yang paling efisien dalam segi waktu dan usaha.
- e) Komunikasi eksternal, organisasi seringkali berkomunikasi dengan pihak luar untuk mempresentasikan produk dan layanan, untuk menampilkan citra perusahaan yang positif untuk menarik karyawan dan untuk mendapatkan perhatian. Jenis komunikasi eksternal pada umumnya meliputi empat program yang berbeda yaitu; hubungan masyarakat, periklanan, promosi dan survey konsumen.

2.2.4. Penyimpangan Perilaku Remaja.

2.2.4.1 Definisi Penyimpangan Perilaku Remaja.

Penyimpangan perilaku remaja atau disebut juga dengan kenakalan remaja, karena kenakalan remaja merupakan tindakan yang menyimpang dan dilakukan oleh kelompok remaja. Tindakan ini mendatangkan gangguan terhadap ketenangan dan ketertiban hidup bermasyarakat (Laning, V. D. 2018). Menurut Albert K. Cohen dalam (Wulandari, S. 2019) menjelaskan perilaku menyimpang merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang cenderung mendominasi. Kondisi sosial ekonomi yang ada dipandang sebagai kendala dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan mereka sehingga menyebabkan kelompok usia muda kelas bawah ini mengalami “status frustration”. Menurut Kartono, Kartini (2017) *Juvenile delinquency* adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari kata Latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Juvenile delinquency muncul sebagai masalah sosial yang semakin gawat pada masa modern sekarang, baik yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka maupun di negara-negara yang sudah maju. Kejahatan anak remaja ini teristimewa

sekali erat kaitannya dengan modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, taraf kesejahteraan dan kemakmuran. (kortono, kartini. 2017).

2.2.4.2 Faktor-faktor penyimpangan perilaku remaja.

Penyimpangan perilaku remaja atau biasa disebut dengan enakalan remaja merupakan salah satu bentuk patologi sosial atau bisa disebut dengan penyakit masyarakat, patologi sosial ini dapat terjadi karena berbagai faktor Menurut (Burlian, P. 2016) faktor terjadinya penyakit masyarakat adalah:

a) Faktor keluarga

Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga, serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadikan anak tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak.

b) Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seorang yang berada di lingkungan yang tidak baik, seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan mudah terjerumus ke dalam kumpulan orang-orang tidak baik itu. Norma (aturan) yang tidak ditegakkan di dalam masyarakat juga ikut menyumbang munculnya penyakit-penyakit sosial.

c) Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang sangat

diperlukan bagi seorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal (pendidikan di sekolah) maupun non formal (pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan). dengan pendidikan, seseorang akan mengetahui mana yang baik dan buruk, mengetahui mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat. Kenakalan remaja seperti perkelahian, pencurian dan lainnya yang ada di daerah biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah (hanya lulus SD atau SMP), tidak bekerja, dan ditinggal oleh orang tua juga rentan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat.

2.2.4.3. Bentuk-bentuk Penyimpangan Perilaku.

Penyimpangan perilaku pada remaja atau kenakalan remaja memiliki berbagai bentuk yang dapat dikenali karena hal ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk kenakalan remaja menurut Bruce J. Cohen dalam (Wulandari, S. 2019) terdapat 4 bentuk penyimpangan perilaku;

a) Penyimpangan primer.

Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang masih dapat diterima secara sosial, pelaku penyimpangan cenderung tidak menganggap bahwa dirinya seseorang yang telah menyimpang hal ini dikarenakan penyimpangan yang dilakukan bersifat temporer. Contoh penyimpangan primer diantaranya memalsukan pembukuan, berkendara melebihi batas kecepatan, minum-minuman keras.

b) Penyimpangan sekunder.

Pada penyimpangan ini pelaku memperlihatkan perilaku menyimpang dan dikenal sebagai seseorang yang menyimpang. Pelaku cenderung tidak disukai oleh masyarakat sekitar karena perilakunya yang telah menyimpang. Contohnya ialah mencuri dan pelecehan seksual.

c) Penyimpangan individu.

Penyimpangan individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh satu orang/perorangan, pelaku penyimpangan individu bertindak mulai dari perencanaan hingga terjadinya perilaku menyimpang tersebut secara individu. contoh penyimpangan individu pada remaja ialah membolos.

d) Penyimpangan kelompok.

Berbeda dengan penyimpangan individu pada penyimpangan kelompok, perilaku ini dilakukan secara berkelompok dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Contoh dari penyimpangan kelompok adalah geng-geng kejahatan yang dapat menimbulkan tindakan seperti tawuran dan perampokan.

2.2.4.4 Macam-macam Kenakalan Remaja.

Di kota-kota besar kenakalan remaja kerap kali terjadi, tindakan kenakalan remaja banyak macam nya. Macam-macam kenakalan remaja menurut Wulandari, S (2019) yaitu;

a) Membolos merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh siswa (remaja) dengan meninggalkan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas pada waktu yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan yang jelas.

b) Menyontek merupakan sebutan terhadap perilaku pelajar dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya yaitu mengambil hasil pekerjaan orang lain yang kemudian dijadikan sebagai hasil karyanya sendiri. Perbuatan menyontek secara tidak

langsung akan ikut memengaruhi kondisi psikologis pelajar seperti rasa rendah diri, kurang percaya diri, ragu-ragu, pesimis dan curiga.

c) Penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika pada remaja dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku remaja. Karena penyalahgunaan narkotik secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak-dampak negatif dan destruktif dengan risiko yang sangat tinggi.

d) Penyalahgunaan alkohol, alkohol dapat memengaruhi pikiran dan berdampak pada tubuh dengan cara tidak terduga, seperti kehilangan koordinasi, refleks lambat, mengganggu penglihatan merusak organ tubuh dan lain-lain. Efek dari penyalahgunaan alkohol pada kepribadian remaja ditandai oleh kurangnya perhatian, kecemasan, depresi, meningkatkan kerentanan terhadap kecelakaan kejahatan dan bunuh diri.

e) Tawuran pelajar merupakan salah satu fenomena kenakalan remaja yang sangat meresahkan. Tawuran antar remaja (pelajar) merupakan cermin semakin minimnya sosok panutan yang bisa menjadi teladan masyarakat khususnya generasi muda di tanah air. Tawuran mendatangkan bentuk penyimpangan dan bahkan pembunuhan yang sadis.

f) Hubungan seksual sebelum menikah (seks bebas), masa-masa remaja inilah di mana seorang dapat dengan mudahnya terjerumus dalam penyimpangan sosial terutama penyimpangan perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas menimbulkan dampak-dampak yang merusak masa depan remaja

g) Merokok, hal yang memprihatinkan adalah usia mulai merokok yang setiap tahun semakin muda. Merokok merupakan kebiasaan yang buruk, orang yang merokok bakal sering

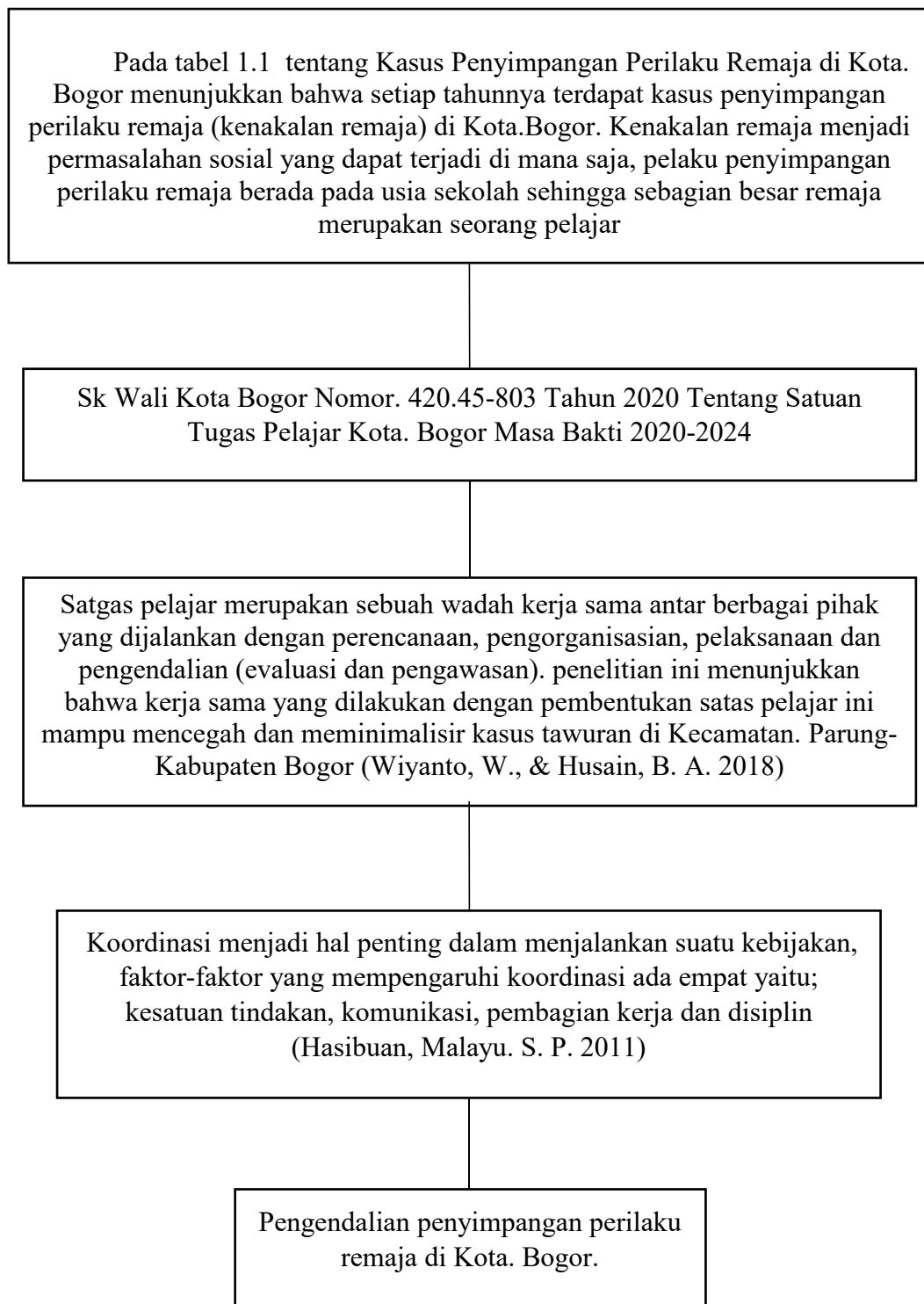
mengalami napas pendek dan batuk-batuk yang sangat mengganggu, mudah lelah, kemampuan indra penciuman dan pengecap rasa berkurang, penuaan dini pada kulit, dll.

h) Kejahatan (kriminalitas) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosiatif dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

i) Prostitusi remaja, penyebab terjadinya praktik prostitusi di kalangan ABG (anak perempuan baru gede usia di bawah 18 tahun) antara lain disebabkan faktor ekonomi, akibat pergaulan bebas, kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak (*broken home*), dan tertipu oleh calo yang berjanji mencarikan pekerjaan.

j) Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupannya dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat individu dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.

2.3 Kerangka Berfikir.



Gambar 2.3
Kerangka berfikir

Penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor terjadi setiap tahunnya berdasarkan tabel.1.1 tentang kasus penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor menunjukkan setiap tahunnya ada saja tindakan kenakalan remaja yang terjadi di kota. Bogor, di dominasi oleh kasus “kekerasan” bahkan sampai ada yang memakan korban. Hal ini menjadi perhatian para guru-guru se-kota bogor dan pemerintah setempat yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Sehingga berdasarkan diskusi bersama terbentuklah satgas pelajar kota. Bogor yang masih hadir hingga saat ini. Pada saat ini satgas pelajar kota. Bogor berjalan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh wali kota. Bogor yaitu Sk Wali Kota Bogor Nomor. 420.45-803 Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Pelajar Kota. Bogor Masa Banti2020-2024.

Satgas pelajar tidak hanya hadir di kota. Bogor beberapa kota/kabupaten juga terdapat satgas pelajar karena di nilai efektif dalam melakukan pencegahan penyimpangan perilaku remaja terutama pada kalangan pelajar hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiyanto, W., & Husain, B. A. (2018) satgas pelajar merupakan sebuah wadah kerja sama antar berbagai pihak yang dijalankan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian (evaluasi dan pengawasan). Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan dengan pembentukan satgas pelajar ini mampu mencegah dan meminimalisir kasus tawuran di Kecamatan. Parung- Kabupaten Bogor. Dalam melakukan implementasi kebijakan satgas pelajar kota. Bogor. Terdapat aktivitas koordinasi di dalamnya hal ini menjadi penting dalam menjalankan suatu kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi ada empat yaitu; kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Dengan adanya koordinasi yang baik maka penyimpangan perilaku remaja di kota. Bogor akan terkendali.